



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.
UNIT KERJA : DEWAN KOMISARIS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENDRIKUS IVO
2. Jabatan : KOMISARIS INDEPENDEN
3. NHK : 188071

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 11.556.850.000

1. Tanah Seluas 338 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 343 m2/230 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.955.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/104 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 28 m2/24 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 34 m2/29 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 46 m2/46 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 760.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/77 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 41 m2/41 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 585.000.000
9. Tanah Seluas 130 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, WARISAN Rp. 170.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/153 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 581.850.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 164 m2/104 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.850.000.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	135.000.000
1. MOBIL, VW GOLF SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI	Rp.	
135.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.621.900.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	7.100.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.719.560.584
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.150.000.000
Sub Total	Rp.	26.283.310.584
III. HUTANG	Rp.	7.400.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	26.275.910.584

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.